

## PERTEMUAN KEEMPAT DIGITAL ECONOMY WORKING GROUP G20

Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G. Plate (kiri) meninjau salah satu stan Industry Task Force (ITF) saat pertemuan keempat Digital Economy Working Group (4th DEWG) Presidensi G20 Indonesia di Nusa Dua, Bali, Senin (29/8). Pertemuan Kelompok Kerja Ekonomi Digital G20 itu mengusung tema besar "Achieving a Resilient Recovery: Working Together for a More Inclusive, Empowering and Sustainable Digital Transformation".



# Akselerasi Ekonomi Keuangan Digital Sejalan dengan Presidensi G20

Terkait koneksi QRIS antarnegara, Perry Warjiyo menjelaskan, Indonesia mendapatkan komitmen dari empat negara ASEAN yakni Thailand, Malaysia, Singapura dan Filipina, untuk meng-koneksikan sistem pembayaran.

JAKARTA (IM) - Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo mengatakan akselerasi ekonomi dan keuangan digital, serta penguatan kerja sama oleh Indonesia di Asia Tenggara dilakukan sejalan dengan peran Indonesia sebagai pimpinan forum ekonomi terbesar di dunia tahun ini atau Presidensi G20 Indonesia.

"Mengakselerasi ekonomi dan keuangan digital nasional serta penguatan kerja sama internasional khususnya di ASEAN sejalan dengan ketetapan Indonesia dalam G20 Tahun 2022, *recover together recover stronger*," kata Perry dalam Peluncuran Kartu Kredit Pemerintah Domestik dan QRIS Antarnegara di Jakarta, dilansir dari *Antara*, Senin (29/8).

BI pada Senin (29/8), menginisiasi Kartu Kredit Pemerintah Domestik dan QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard) Antarnegara yang secara resmi diluncurkan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Perry menjelaskan KKP Domestik akan dapat memfasilitasi pembelian barang dan jasa dari pemerintah, baik pusat maupun daerah,

dengan skema pembayaran kartu kredit pemerintah yang prosesnya dilakukan secara domestik.

Hal itu, kata Perry, untuk menindaklanjuti Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang penggunaan transaksi non tunai untuk belanja pemerintah, baik di pusat maupun di daerah, dan penggunaan produk dalam negeri.

Penerapan KKP domestik ini, kata Perry, dalam tahap awal dilakukan melalui interkoneksi QRIS yang sudah didukung 85 penyelenggara sistem pembayaran dengan 20,3 juta toko usaha atau *merchant*.

"Sehingga ini betul-betul bisa langsung dilakukan. Sekaligus QRIS ini juga sudah dilakukan untuk mendukung Gerakan Bangga Buatan Indonesia khususnya bagi pelaku UMKM untuk dapat bertransaksi secara digital," ujarnya.

Perry juga menjelaskan QRIS yang diluncurkan sejak Mei 2019, telah menjadi satu-satunya standar sistem pembayaran yang berlaku di Indonesia. Para pengguna QRIS juga didominasi oleh pengguna dari UMKM.

Selain QRIS, BI juga telah

meluncurkan Standar Nasional Open API Indonesia dan infrastruktur sistem pembayaran ritel BI-Fast.

Terkait koneksi QRIS antarnegara, Perry menjelaskan, Indonesia mendapatkan komitmen dari empat negara ASEAN yakni Thailand, Malaysia, Singapura dan Filipina, untuk mengkonkresikan sistem pembayaran. "QR, *fast payment*, *currency*, ini kami akan sambungkan. Hari ini mulai dengan implementasi penuh dengan Thailand. QR Indonesia dengan QR Thailand sudah kami uji cobakan dan mulai hari ini implementasi penuh. Sehingga untuk transaksi pariwisata, perdagangan UMKM sudah bisa menyambungkan QR," kata Perry.

Selain itu, kata Perry, penerapan koneksi sistem pembayaran QR sudah di-

ujicobakan dengan Malaysia sejak Januari 2022, sedangkan dengan Singapura sedang difinalisasi.

"Dalam waktu dekat 5 negara kita bisa melakukan digitalisasi sistem pembayaran, *cross border*, QR, *fast payment* dengan pembayaran mata uang lokal yang sekaligus mendukung pariwisata, mendukung UMKM, dan juga mendukung ekonomi keuangan digital secara nasional," kata Perry.

Menurut data BI, nilai transaksi QRIS dalam satu tahun mampu tumbuh 305,49 persen ke Rp4,52 triliun pada Februari 2022. Sementara itu, volume transaksi QRIS juga tumbuh 268,64 persen (*year on year*) ke 54,91 juta pada Februari 2022.

Perry juga mengatakan, QRIS Antarnegara resmi dapat digunakan secara penuh di

Thailand sehingga beragam transaksi mulai dari pariwisata hingga perdagangan UMKM bisa lebih mudah.

"Hari ini (Senin), mulai implementasi penuh dengan Thailand. QR Indonesia dan QR Thailand sudah kita uji cobakan dan mulai hari ini implementasi penuh," kata Perry.

QRIS Antarnegara ini akan mempermudah masyarakat dalam melakukan transaksi di Thailand karena tidak perlu menukarkan uang melainkan hanya dengan scan barcode QRIS.

Ia menuturkannya hal tersebut merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden Joko Widodo untuk menyambungkan sistem pembayaran Indonesia ke dunia yang dimulai dari ASEAN. • dot

## PIDI 4.0 Percepat Transformasi Digital Sektor Industri

JAKARTA (IM) - Perkembangan industri 4.0 yang semakin pesat di kancah global membuat Indonesia harus berupaya aktif untuk mengakselerasi transformasi digital di sektor manufaktur. Apalagi, Pemerintah Indonesia telah menyiapkan peta jalan Making Indonesia 4.0, yang tujuan utamanya antara lain meningkatkan daya saing industri manufaktur nasional hingga tingkat internasional.

"Sebagai salah satu langkah nyata untuk mewujudkan sasaran roadmap Making Indonesia 4.0 tersebut, Kementerian Perindustrian telah membangun Pusat Industri Digital Indonesia 4.0 (PIDI 4.0) dalam rangka mempercepat pengembangan dan implementasi industri 4.0 di Indonesia," kata Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri (BPSDMI) Kementerian Perindustrian, Arus Gunawan di Jakarta, Senin (29/8).

Arus menjelaskan, PIDI 4.0 didirikan sebagai solusi satu atap penerapan industri

4.0 di Indonesia, yang sekaligus menjadi Jendela Indonesia 4.0 pada dunia. "PIDI 4.0 juga untuk menyiapkan sumber daya manusia yang kompeten di bidang industri 4.0," tuturnya.

Beberapa waktu lalu, pada acara Indonesia 4.0 Conference & Expo tahun 2022 di Jakarta, PIDI 4.0 turut berpartisipasi dengan menampilkan showcase beberapa mitra PIDI 4.0, yakni Rexroth, TÜV Rheinland, AWASIN dan Widya Robotics.

Direktur PIDI 4.0 sekaligus Kepala Pusdiklat SDM Industri BPSDMI Kemperin, Tirta Wisnu Permana menyampaikan, sektor manufaktur di Indonesia selalu berkembang seiring dengan transformasi digital.

"Untuk mempercepat transformasi industri 4.0 di Indonesia, diharapkan seluruh pemangku kepentingan berpartisipasi dan berkontribusi secara aktif melalui PIDI 4.0," paparnya.

Wisnu menjelaskan, PIDI 4.0 memiliki lima pilar atau layanan utama. Pertama, Showcase Center,

untuk meningkatkan kesadaran tentang industri 4.0 dan menyajikan pengalaman real bagaimana industri 4.0 di implementasikan dalam lini produksi.

Kedua, Capability Center, sebagai pusat pelatihan untuk meningkatkan keahlian tenaga kerja industri dan aparat sipil negara (ASN). Ketiga, Ecosystem for Industry 4.0, sebagai tempat kolaborasi pengembangan implementasi industri 4.0.

Keempat, Delivery Center, sebagai tempat pendampingan industri dalam bertransformasi menuju industri 4.0. "Yang kelima adalah Engineering and AI Center, yang membantu permasalahan industri dengan teknologi rekayasa dan kecerdasan buatan," ujar Wisnu.

Kelahiran PIDI 4.0 dalam ajang Indonesia 4.0 Conference & Expo tahun 2022 juga diharapkan dapat memperkokoh eksistensi PIDI 4.0 baik di dalam maupun luar negeri, serta membuka peluang kerja sama untuk bersama memajukan industri 4.0. • hen

## Menteri ESDM Sebut Transisi Energi Tingkatkan Ketahanan Nasional

JAKARTA (IM) - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif mengatakan arah kebijakan energi nasional ke depan adalah transisi energi dari fosil menuju energi bersih yang minim emisi dan ramah lingkungan.

"Transisi energi diperlukan untuk meningkatkan ketahanan energi nasional mengingat cadangan bahan bakar fosil yang terbatas," ujar Arifin dalam seminar nasional bertajuk "Patriot Energi 2022" di Jakarta, Senin (29/8).

Arifin mengungkapkan bahwa Indonesia masih memiliki potensi energi baru dan terbarukan (EBT) yang besar yakni mencapai lebih 3.000 gigawatt yang berasal dari surya, hidrogen, bioenergi, biomassa, panas bumi, dan juga sumber daya laut.

Oleh karena itu, Kementerian ESDM sangat mendukung transisi energi yang berpusat kepada manusia atau *people centered energy transitions* yang mencakup tidak hanya peralihan ke energi yang lebih bersih, tetapi juga terkait penyediaan kesempatan kerja dan keterampilan, peningkatan pembangunan sosial dan ekonomi, kesetaraan dan keadilan, serta melibatkan masyarakat secara aktif.

Dalam penyediaan akses energi bersih, kata Arifin, Kementerian ESDM telah membangun sejumlah infrastruktur EBT terutama di daerah terdapat, terluar, tertinggal, dan wilayah transmigrasi (4T), yaitu dalam bentuk pembangkit listrik tenaga surya, mikrohidro, hybrid, biomassa, lampu tenaga surya hemat energi, dan penerangan jalan umum tenaga surya dengan menggunakan dana APBN maupun dana

alokasi khusus "Keterlibatan pemerintah daerah dan masyarakat lokal sangat krusial dalam pembangunan infrastruktur energi baru terbarukan. Pemanfaatan teknologi tepat guna serta mengajaga aspek keberlanjutan dari infrastruktur infrastruktur tersebut," terang Arifin.

Kementerian ESDM mencatat angka rasio elektrifikasi nasional telah mencapai 99,2 persen dan masih menyisakan 0,8 persen masyarakat yang belum menikmati listrik.

Arifin menyampaikan bahwa masih terdapat desa yang gelap gulita dan 3.090 desa yang listriknya masih menggunakan lampu tenaga surya hemat energi (LTSHE) dan perlu diupayakan untuk mendapatkan pasokan listrik yang lebih andal dan kontinu.

Dukungan dan partisipasi dari semua pihak, termasuk generasi muda Indonesia sangat diperlukan untuk meningkatkan pengembangan energi baru terbarukan dan perluasan akses energi kepada masyarakat.

Dalam upaya melibatkan generasi muda Indonesia, Kementerian ESDM telah melaksanakan program Patriot Energi bekerja sama dengan Yayasan Institut Bisnis dan Ekonomi Kerakyatan (IBEKA) dengan tujuan mendorong keterlibatan generasi muda dalam pendampingan, pengembangan, pembangunan, dan pengelolaan pembangkit setrum bersih secara berkelanjutan melalui pemanfaatan potensi energi baru terbarukan setempat untuk memberikan akses listrik kepada masyarakat dengan andal dan kontinyu khususnya di daerah 4T. • hen



### KUNJUNGAN KERJA WAMEN BUMN II DI INKA

Wakil Menteri (Wamen) BUMN II Kartika Wirjoatmodjo (kedua kanan) menyaksikan Direktur Utama PT VKTR Teknologi Mobilitas Gilarsi W Setijono (keempat kiri) dan Dirut PT INKA (Persero) Budi Noviantoro (keenam kiri) yang memperlihatkan naskah nota kesepahaman kerja sama pembuatan komponen otomotif setelah ditandatangani saat melakukan kunjungan kerja di Kota Madiun, Jawa Timur, Senin (29/8). Kunjungan kerja Wamen Kartika Wirjoatmodjo dalam rangka menyaksikan uji jalan mobil listrik yang akan digunakan untuk mendukung transportasi para delegasi KTT G20 serta menyaksikan penandatanganan sejumlah naskah nota kesepahaman.



**BPR SUPRA**

---

**PULAUINTAN**

General Contractor

---



**PT. INDOCHEMICAL CITRA KIMIA**

Solvents, Industrial and Specialty Chemicals

## Komitmen Pemerintah Terus Mendukung Kelapa Sawit Berkelanjutan

JAKARTA (IM) - Pemerintah melalui Komite Pengarah Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) tetap berkomitmen mendukung sektor perkebunan kelapa sawit sebagai salah satu komoditas strategis nasional.

Dalam rapat Komite Pengarah (Komrah) BPDPKS pada Minggu (28/8), diperoleh keputusan yang telah menyetujui lima hal yakni Perpanjangan Tarif Pungutan Ekspor (PE) sebesar US\$0 untuk semua produk s.d. 31 Oktober 2022, Penambahan Alokasi Biodiesel Tahun 2022, Pembangunan Pabrik Minyak Makan Merah (3M), Dukungan Peningkatan Peningkatan Sertifikasi Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO), dan Percepatan Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR).

"Perpanjangan Tarif PE sebesar US\$0 dimaksudkan untuk menjaga momentum saat ini, di mana harga *Crude Palm Oil* (CPO) mulai stabil, harga minyak goreng mulai turun, dan harga tandan buah segar (TBS) yang mulai meningkat, sehingga membuat petani atau pekebun mulai merasakan manfaatnya," ungkap Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam rapat yang diselenggarakan secara virtual tersebut.

Peningkatan kembali aktivitas ekonomi masyarakat juga diproyeksikan akan menyebabkan kenaikan permintaan minyak solar di Triwulan IV - 2022. Oleh karena itu, kecukupan biodiesel se-

bagai campuran B30 hingga akhir Desember 2022 perlu dijaga dengan meningkatkan alokasi volume biodiesel pada tahun ini, yang semula sebesar 10.151.018 kiloliter (kL) menjadi 11.025.604 kL.

"Untuk meningkatkan keberterimaan kelapa sawit Indonesia di pasar dunia, Komrah sepakat untuk mempercepat peningkatan sertifikasi ISPO. Di antaranya dengan menempatkan Sekretaris ISPO di bawah BPDPKS, serta mendukung kegiatan-kegiatan yang bertujuan mempercepat peningkatan sertifikasi ISPO," jelas Airlangga.

Rapat Komrah juga meminta agar segera dilakukan rapat koordinasi dengan Aparat Penghak Hukum (APH) sebagai upaya percepatan pelaksanaan Program PSR. Selanjutnya, juga diberi mandat kepada Kementerian Pertanian dan BPDPKS agar segera melakukan studi terkait dana pendampingan PSR yang saat ini hanya sampai P0 menjadi TMI.

Rapat Komite Pengarah tersebut dipimpin langsung Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Komite Pengarah BPDPKS serta turut dihadiri oleh Menteri Keuangan, Menteri Perindustrian, Wakil Menteri BUMN I, Direktur Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPDPN, Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. • pan

## KEK Nongsa Digital Park Dukung Pengembangan Ekonomi Digital

JAKARTA (IM) - Kebutuhan atas pengembangan teknologi digital saat ini semakin tinggi seiring dengan tuntutan kemajuan teknologi, sehingga juga semakin membuka peluang investasi bagi dunia usaha. Dengan potensi industri digital di Indonesia yang begitu besar, menjadi latar belakang terbentuknya Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Nongsa Digital Park (NDP) di Batam, sebuah kawasan yang menggarap peluang investasi di bidang industri digital.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menerangkan bahwa teknologi digital memiliki peran yang sangat penting serta telah membantu Pemerintah dan swasta dalam merampingkan proses bisnis yang rumit. Selain itu, teknologi digital juga membantu mempromosikan lingkungan kerja yang lebih praktis dan fleksibel.

Melanjutkan rangkaian agenda kunjungan di kota Batam, Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiario bersama rombongan Kemkeno Perekonomian mengunjungi KEK NDP, Minggu (28/8).

Ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 68 tahun 2021, KEK NDP memiliki target total investasi sebesar Rp39,9 triliun dengan target penyerapan tenaga kerja sebesar 16.500 orang pada 2040. Selain dikembangkan dengan sektor bisnis utama di bidang IT-Digital, KEK NDP juga melaksanakan kegiatan pendukung di bidang pengembangan pariwisata.

Pembangunan KEK NDP ini merupakan bagian dari upaya strategis Pemerintah dalam mendukung pengembangan ekonomi digital di Indonesia dan konektivitas internasional khususnya di kawasan Asia Tenggara, serta menjadi *pilot plan* kawasan berbasis *service* dan digital yang dapat direplikasi pada beberapa wilayah di Indonesia.

KEK NDP juga mampu menghemat devisa negara dalam bisnis digital hingga Rp20 triliun-Rp30 triliun per tahun dengan kontribusi terbesar dari sektor data center dan pendidikan internasional.

Pengembangan KEK NDP di sektor IT-Digital mencakup *data center*, IT Office Park (*co-working space*), pendidikan IT, industri animasi dan perfilman, serta *service center*.

Di sektor pariwisata sendiri, KEK NDP telah dibangun menjadi kawasan pariwisata pendukung ekosistem industri digital. Infrastruktur turut disiapkan mulai dari jalan kawasan dan drainase, air, listrik, ferry terminal, hingga jaringan telekomunikasi. Sebagai *entry point* bagi perusahaan IT internasional dari Singapura dan mancanegara, KEK NDP juga telah ditetapkan menjadi IT Hub Digital Bridge Indonesia ke Singapura dan mancanegara. Pembangunan KEK NDP telah memaksimalkan koneksi internet internasional, di mana terdapat 7 kabel FO bawah laut berjarak 2-3 km dari KEK NDP, yang dapat dimaksimalkan untuk pengembangan *data center* dan industri animasi. • dro